

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

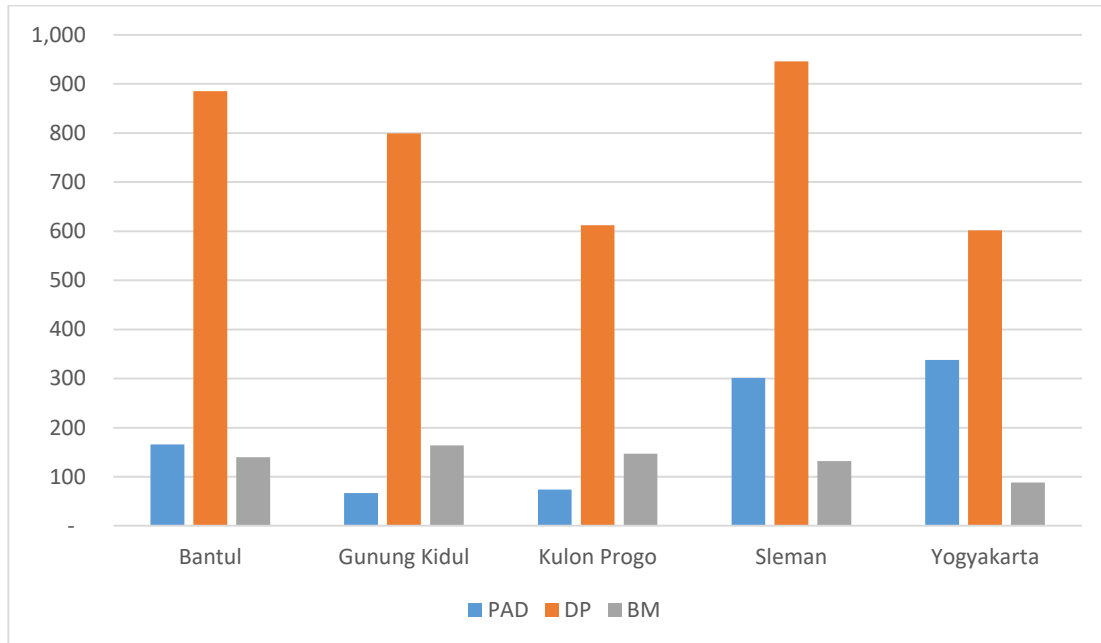
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diakses pada laman milik Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia tahun 2012-2017. Pada bab III, telah dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan *convenient sampling*. Yaitu dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel, dan didapatkan 30 laporan keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sampai 2017.

B. Uji Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, *mean* atau nilai rata-rata, serta *standar deviation* atau simpangan baku dari variabel independen maupun variabel dependen. Hasil statistik ditunjukkan pada gambar dan table berikut:

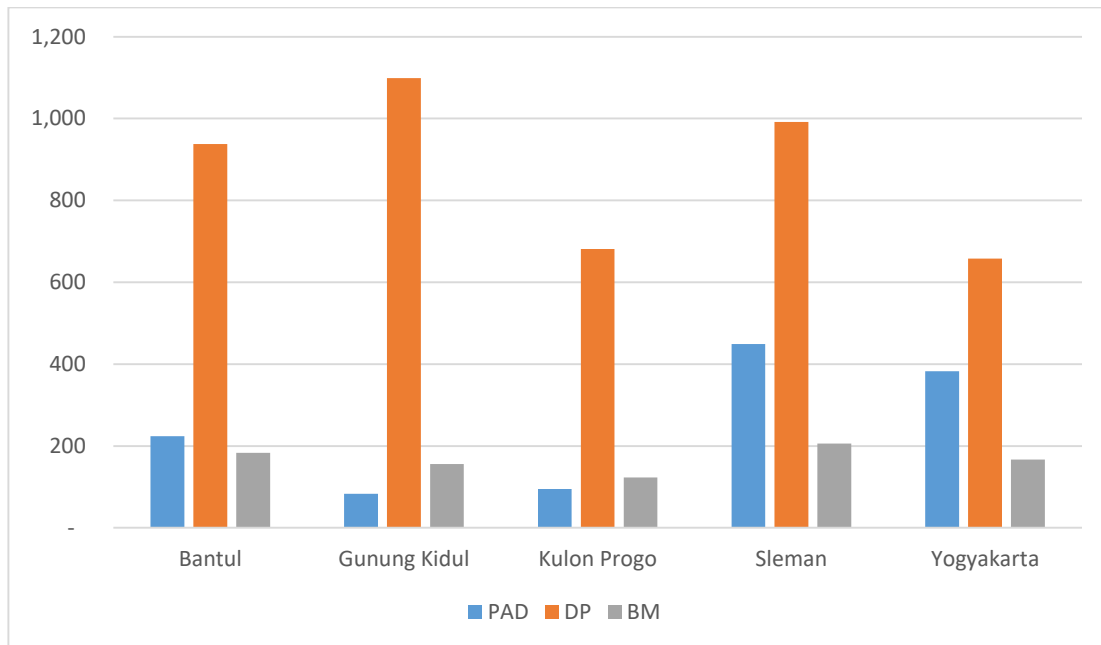


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.1

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2012

Gambar diatas menunjukkan data PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Daerah dengan PAD tertinggi adalah Kota Yogyakarta dan yang paling rendah adalah Kabupaten Gunung Kidul. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sleman merupakan yang paling tinggi, sedangkan Kabupaten Kulon Progo menerima dana perimbangan paling sedikit. Kabupaten Gunung Kidul melakukan belanja modal paling banyak, sedangkan Kota Yogyakarta paling sedikit dibanding yang lain.

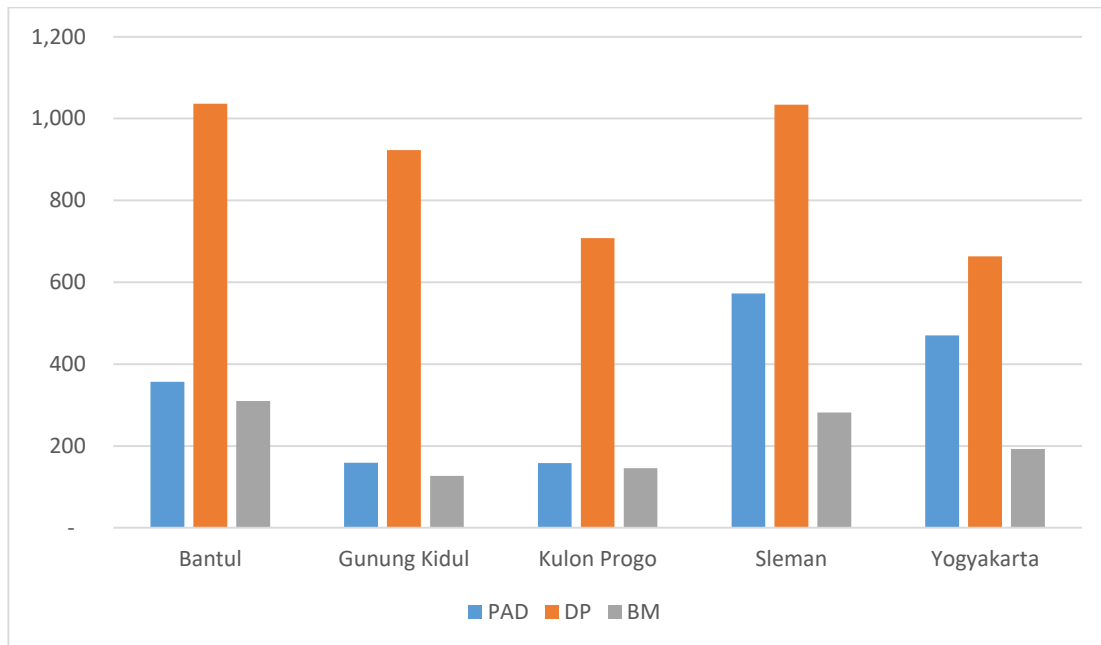


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.2

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2013

Pada tahun 2013, pencapaian pendapatan asli daerah tertinggi adalah kabupaten Sleman, sedangkan paling rendah kabupaten Gunung Kidul. Namun, kabupaten Gunung Kidul memperoleh dana perimbangan tertinggi, kebalikan dengan kota Yogyakarta yang diberikan dana perimbangan paling rendah se-DIY. Selain itu, Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan belanja modal paling banyak, sedangkan Kabupaten Kulon Progo menjadi peringkat terakhir dalam belanja modal.

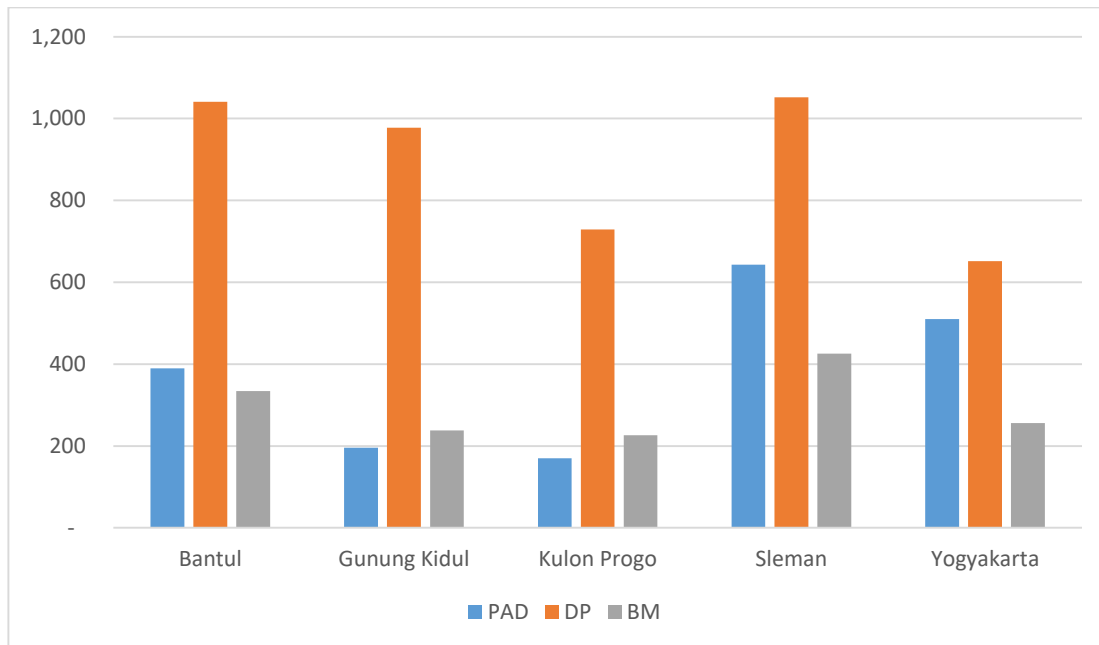


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.3

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2014

Kabupaten Sleman memperoleh PAD tertinggi di Propinsi DIY pada tahun 2014, sedangkan kabupaten Kulon Progo menjadi yang paling rendah. Dana Perimbangan yang diterima kabupaten Bantul merupakan yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lain, sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan dana perimbangan paling sedikit. Belanja modal paling banyak dilakukan oleh Kabupaten Bantul, sedangkan yang paling rendah yakni kabupaten Gunung Kidul.

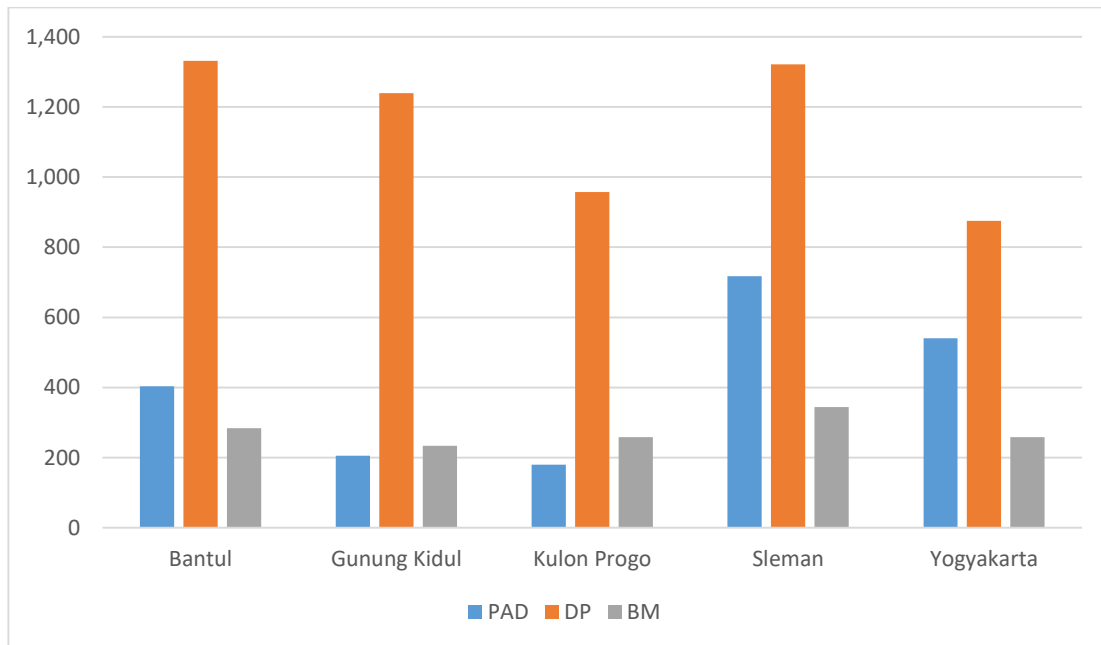


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.4

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2015

Pada tahun 2015, kabupaten Sleman memperoleh PAD paling besar, sedangkan kabupaten Kulon Progo memperoleh PAD paling sedikit. Selain itu kabupaten Sleman juga mendapatkan kucuran dana perimbangan paling tinggi dibanding yang lainnya. Kota Yogyakarta mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat paling sedikit. Kabupaten Sleman juga merupakan kabupaten yang melakukan kegiatan belanja modal paling besar, berlawanan dengan kabupaten Kulon Progo dengan belanja modal paling rendah.

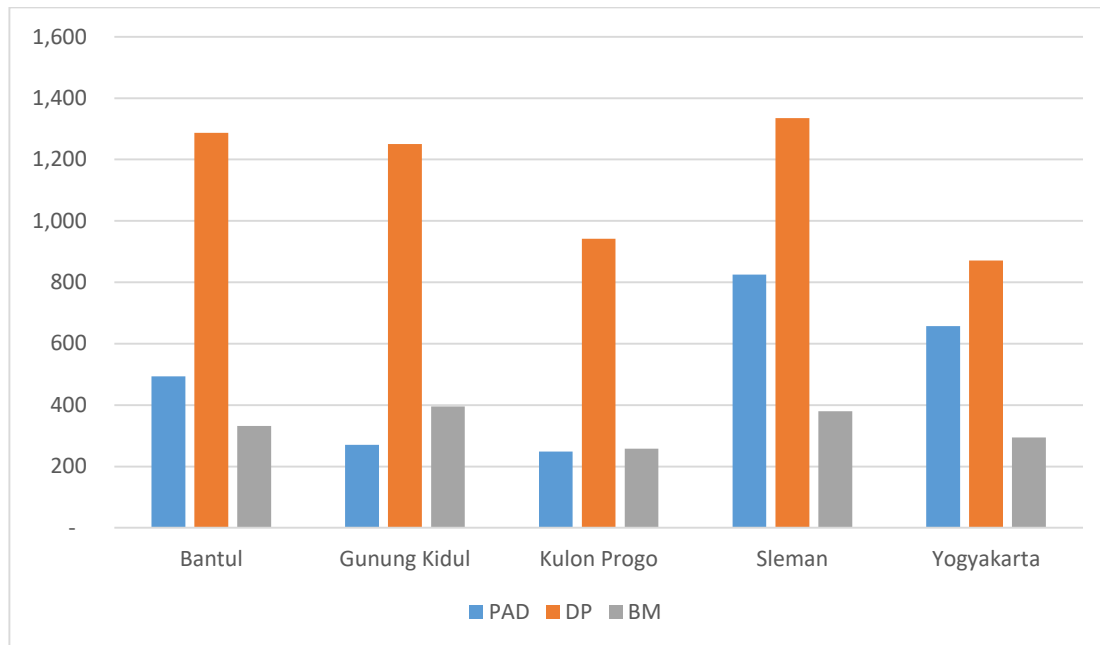


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.5

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY Tahun 2016

Kabupaten Sleman pada tahun 2016 menempati urutan pertama dalam pendapatan asli daerah se-DIY, sedangkan urutan terakhir ditempati oleh kabupaten Kulon Progo. Selain itu kabupaten Bantul mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat paling banyak diantara yang lain, dan kota Yogyakarta mendapatkan transferan dana paling sedikit. Belanja modal paling banyak dilakukan oleh kabupaten Sleman, sedangkan yang paling sedikit melakukan belanja modal adalah kota Yogyakarta.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 DJPK (diolah peneliti)
*dalam miliar rupiah.

GAMBAR 4.6

Data PAD DP Dan BM Kabupaten/ Kota Di Propinsi DIY Tahun 2017

Kabupaten Sleman memperoleh pendapatan asli daerah paling besar, sedangkan kabupaten Kulon Progo mendapatkan pendapatan asli daerah paling sedikit. Selain tu dana perimbangan yang diterima kabupaten Sleman juga yang paling besar diantara kabupaten/kota yang lain. Sedangkan kota Yogyakarta merupakan daerah yang mendapatkan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat paling sedikit. Pada tahun 2017, kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang melakukan belanja modal paling banyak, kebalikan dengan kabupaten Kulon Progo yang melakukan belanja modal paling sedikit.

TABEL 4.1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
PAD	30	6.7	82.6	34.530	20.6975
DP	30	60.2	133.6	94.840	22.65.6538
BM	30	8.8	42.7	23.660	8.9773
KK	30	0.06	0.40	0.2043	0.09551

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima oleh daerah yang di dapatkan dari sumber kekayaan daerahnya yang pemungutannya diatur dalam undang-undang. Pendapatan asli daerah ini sangat penting bagi kelangsungan daerah dalam jangka panjang. Hasil uji statistik deskriptif yang telah diolah pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 30. Jumlah rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) adalah 34.5. Selain itu jumlah PAD paling kecil adalah 6.7 sedangkan yang paling besar 82.6 dengan standar deviasi 20.6975.

Dana perimbangan adalah dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang gunanya untuk mempercepat pembangunan daerah tersebut dan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Besaran dana perimbangan ini berdasar pada kebutuhan daerah setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel

4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata dana perimbangan (X2) sebesar 948.430 dengan nilai minimum 60.2 dan nilai maksimum 133.6 dengan standar deviasi 22.6538 dari rata-rata.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal belanja modal ini mencakup belanja tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Jumlah rata-rata dari belanja modal (X3) ini adalah sebesar 23.660 dengan nilai maksimum 42.7 dan nilai minimum 8.8 dan standar deviasinya adalah sebesar 89.773.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian dari suatu hasil kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah berupa anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam suatu sistem yang telah ada yang disahkan dalam undang-undang dan dalam satu periode. Jumlah dari rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 0.2043 dengan nilai minimum 0.06 dan nilai maksimum 0.4 sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0.09551.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,

2005). Jika terdapat normalitas maka residual terdistribusi secara normal dan independen. Perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai skor yang sesungguhnya atau eror akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai nol. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

TABEL 4.2
Uji Normalitas

No	Kolmogorov- Smirnov	Nilai Signifikansi	Keterangan
1.	0.092	0.05	Terdistribusi Normal

Dari hasil test of normality diketahui nilai statistik 0.092 atau nilai sig 0,200 atau 20% lebih besar dari nilai α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2005). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya yang tidak kurang dari 0,1 (2) variance influence factor (VIF) tidak lebih dari 10, maka

model tersebut akan dikatakan bebas dari multikolinearitas. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

TABEL 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance Value	Base of Tolerance Value	VIF	Base Value of VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0.551	>10	1.814	<10	Tidak terdapat multikolinearitas
Dana Perimbangan	0.538	>10	1.858	<10	Tidak terdapat multikolinearitas
Belanja Modal	0.352	>10	2.841	<10	Tidak terdapat multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada table 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), serta belanja modal (BM) memiliki angka VIF kurang dari 10. Selain itu ketiga variabel independen ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti ketiga variabel yang dipakai dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi atau korelasi yang terjadi antara residual pada saat pengamatan lain pada model regresi. Menurut Ghozali (2005) uji autokorelasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Pada penelitian autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watsons (DW Test). Adapun kriteria dalam uji Durbin Watsons adalah sebagai berikut;

- a. jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Dibawah ini adalah hasil uji autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watsons;

TABEL 4.4
Uji Autokorelasi Durbin Watsons

No	Durbin Watsons	dL	dU	Keterangan
----	----------------	------	------	------------

1	1.393	1.2138	1.6498	Tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti
---	-------	--------	--------	--

Nilai dari dU dan dL diperoleh dari table statistik Durbin Watsons yaitu dL, $\alpha= 1.2138$ dan dU, $\alpha= 1.6498$. Nilai dari output table 4.4 adalah sebesar 1.393. Dengan ketentuan yang telah dijelaskan diatas bahwa hasil uji Durbin Watsons terletak antara dL dan dU maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu diperlukan uji autokorelasi dengan *runs test*.

Uji *runs test* ini dilihat nilai *asympt.sig.*, jika nilai *asympt.sig.*, lebih besar dari 0.05 atau 5% maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya apabila ditemukan nilai *asympt.sig* kurang dari 0.05 atau 5% maka terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi penelitian yang digunakan. Berikut ini hasil dari uji autokorelasi *runs test*;

TABEL 4.5
Uji Autokorelasi *Runs Test*

No	Asymp. Sig	Tingkat Signifikansi	Keterangan
1	0.193	> 0.05	Tidak terdapat gejala autokorelasi

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa *asympt.sig* pada uji runs test penelitian ini adala sebesar 0,193 atau lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, yang membutuhkan syarat tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Dasar dari kriteria uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut;

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas;

TABEL 4.6
Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikansi	Alpha Signifikansi	Heteroskedastisitas
1	Pendapatan Asli Daerah	0.405	> 0.05	Tidak
2	Dana Perimbangan	0.137	> 0.05	Tidak

3	Belanja Modal	0.094	> 0.05	Tidak
---	---------------	-------	--------	-------

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai Sig. pada tabel 4.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel mulai dari PAD, dana perimbangan maupun belanja modal memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0.05 atau 5%. Jadi, kesimpulannya model regresi penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Penelitian yang didalamnya terdapat lebih dari dua variabel maka dapat diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2011) metode ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen, yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dibawah ini merupakan hasil pengujian model regresi linier berganda;

TABEL 4.7
Uji Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Test Value	Sig	B	Hasil
	Konstanta			0.187	
1	Pendapatan Asli Daerah	0.000	< 0.05	0.005	Diterima

2	Dana Perimbangan	0.000	< 0.05	-0.001	Diterima
3	Belanja Modal	0.444	> 0.05	- 0.001	Ditolak

Dari hasil tabel 4.7 diatas dapat disusun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$KKPD = 0,187 + 0.005 (PAD) - 0.001 (DP) - 0.001 (BM) + \varepsilon$$

Model regresi serta kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut;

1. Nilai konstanta sebesar 0,187 berarti apabila nilai variabel PAD, DP, dan BM bernilai 0, maka anggaran belanja modal akan makin bertambah.
2. Variabel PAD menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan yang memiliki pola positif sehingga semakin banyak PAD yang diterima akan semakin tinggi pula kinerja keuangannya. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan nilai sig < 0.05 dan nilai koefisiensi 0.005. Jadi, hipotesis pertama yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi D.I. Yogyakarta, **diterima**.
3. Variabel DP atau dana perimbangan menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan dan memiliki pola negatif sehingga semakin

banyak dana perimbangan yang diterima maka akan semakin menurun kinerja keuangannya. DP berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisiensi sebesar -0.001 dan nilai sig < 0.05. Jadi hipotesis kedua yaitu dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi D.I. Yogyakarta, **diterima**.

4. Variabel BM atau belanja modal menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan dan memiliki pola negatif maka semakin banyak belanja modal akan semakin menurun kinerja keuangannya. Jadi BM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisiensi sebesar -0.001 dan nilai sig >0.05. Jadi, hipotesis ketiga yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi D.I. Yogyakarta, **ditolak**.

b. Uji Koefisien Determinasi

Uji R^2 dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi dalam variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan kemampuan dependennya sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan

dalam memprediksi variasi variabel independen. Hasil koefisiensi determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

TABEL 4.8
Uji Koefisiensi Determinasi

No	Variabel	Adjusted R Square
1	Kinerja keuangan pemerintah daerah (dependen)	0.922
2	Pendapatan asli daerah	
3	Dana perimbangan	
4	Belanja Modal	

Berdasarkan tabel diatas hasil dari analisis regresi berganda dapat diketahui dengan koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,922. Hal ini berarti 92,2% variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), dan belanja modal (X_3). Sedangkan 7,8% lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

c. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini menguji variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Hipotesis pertama dan kedua yaitu pendapatan asli daerah dan dana

perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Sedangkan untuk variabel ketiga yaitu belanja modal, ditolak. Adapun untuk penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi daerah itu sendiri contohnya seperti retribusi daerah, pajak daerah, laba BUMD, serta penerimaan lain-lain yang sah serta bukan bersumber dari pajak atau retribusi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima maka akan membuat pemerintah daerah memaksimalkan sumber dayanya agar dapat dijadikan sebagai pundi-pundi pendapatan asli daerah yang tentu saja akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antari, dkk (2018), Febriansyah (2013), serta Budianto (2016) juga menerangkan hal yang serupa dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan bersih yang berhak diakui oleh pemerintah daerah dan mempunyai kebebasan untuk mengelola pendapatan dari daerahnya sendiri.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. Karena pendapatan asli daerah adalah sumber daya milik daerah yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga diharapkan daerah memiliki kemandirian dalam memperoleh maupun mengelola pendapatannya. Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah yang berasal dari APBN dengan tujuam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh daerah maka menunjukkan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah masih rendah karena masih bergantung kepada pemerintah pusat dan membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam menggunakan pendapatan.

Dari hasil penelitian, variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malendra (2016), Julitawati, dkk (2012) serta Budianto (2016) bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena, semakin banyak dana yang

digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara finansial.

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka menunjukkan kemandiriannya rendah. Kemandirian yang rendah menunjukkan kinerja keuangan yang rendah pula.

c. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa penambahan aset tetap dengan melakukan pembelanjaan/pengeluaran yang masa manfaatnya diharapkan lebih dari satu periode akuntansi. Hasil uji parsial dari variabel belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga ini tidak sesuai dengan penelitian dari Andirfa (2016), Nugroho, dkk (2012) dan Mulyani, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena belanja modal berfungsi untuk mengakuisisi, membeli dan membuat atau membangun suatu aset tetap yang nantinya akan berguna bagi pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari belanja modal yang merupakan pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap

yang diharapkan akan meningkatkan pembangunan daerah yang tentu saja mencerminkan kinerja keuangannya. Selain itu kemungkinan bahwa pembelian atau pengadaan aset daerah belum dapat diukur dalam satu periode akuntansi karena aset tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah.

